

Buletin Parlementaria



DPR Perjuangkan Aspirasi Desa



4 Netralitas
Pimpinan
Tertinggi ASN
Jadi Teladan
Jajaran di
Bawahnya



20 Kilas Balik 2023,
DPR Transformasi
Kesehatan Lewat
UU Omnibus Law

Nomor 1279/1/II/2024 • Februari 2024



9 772614 339005



DPR Perjuangkan Aspirasi Desa

Anggota Badan Legislati (Baleg) DPR RI Santoso dan Luluk Nur Hamidah menerima perwakilan demonstiran dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Ruang rapat Pansus, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (31/1). Keduanya senada ingin memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi dan tuntutan Apdesi.

Dalam forum tersebut, Santoso menjelaskan tahapan dalam penyusunan undang-undang. Ia pun menjanjikan akan memperjuangkan supaya dalam pembahasan revisi UU Desa ada diskresi. Dalam audiensi ini hadir para perwakilan pengurus termasuk Ketua Umum Apdesi.

"Kemudian saya melihatnya, bahwa kondisi ini harus ada diskresi, ada perlakuan khusus, kami akan perjuangkan. Maka harus ada diskresi dalam undang-undang itu. Jadi apakah waktunya tepat atau terlambat, tetap akan memprioritaskan apa yang menjadi aspirasi kepala desa," papar Santoso disambut tepuk tangan para perwakilan demonstiran.

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini mengungkapkan, dari semua yang disampaikan oleh kepala desa, bahwa intinya tuntutannya adalah, adanya kepastian dalam pengesahan UU Desa. Oleh sebab itu Santoso menjelaskan bahwa di DPR ada proses dan tahapan yang harus dilakukan, berdasarkan Undang-Undang tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan, menurutnya tahapan-tahapan ini harus dilalui.

"Dan tadi saya mendengar, bahwa Pak Sekjen sudah bertemu menyampaikan tahapan-tahapan ini. Untuk itu lah, kebetulan saya ada di Baleg, meskipun agak sulit,



FOTO: MUN/AHA

Anggota Badan Legislati (Baleg) DPR RI Santoso dan Luluk Nur Hamidah mendatangi demonstiran dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di depan Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/1/2024).

apa yang menjadi aspirasi bapak ibu para kepala desa, saya akan dikomunikasikan kepada pimpinan DPR agar apa yang menjadi aspirasi ini, mudah-mudahan bisa dipenuhi," ungkap Santoso.

Di kesempatan yang sama Anggota Baleg DPR RI Luluk Nur Hamidah menyampaikan, akan memperjuangkan pada masa sidang ini revisi UU Desa bisa disahkan. "Kalau memang kita bisa memberikan percepatan kenapa harus ada penundaan, itu sikap yang harus saya sampaikan kepada bapak-bapak. Kita juga meminta dan menghendaki agar, masa sidang ini sebelum pemilu, seharusnya revisi undang-undang ini bisa disahkan, karena ini

tugas konstitusional," jelasnya.

Di luar gedung DPR RI Sejumlah perangkat desa yang tergabung Apdesi melakukan demonstrasi di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Sementara itu, pihak keamanan sudah bersiaga mengamankan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR. Dua Anggota Baleg tersebut pun ikut turun menjumpai para demonstiran, bahkan keduanya diberikan kesempatan untuk melakukan orasi.

"Desa itu lebih penting bagi kita, bagi kita desa kuat, desa sejahtera, desa maju, anggarannya diperkuat, itu lebih penting," tandas Luluk, disambut riuh tepuk tangan para Apdesi. **ssb/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Pembahasan RUU Desa Lanjut Usai Pemilu



FOTO: ENO/PDT

Ketua DPR RI Puan Maharani saat menerima sejumlah kepala desa (Kades) yang menanyakan kelanjutan pembahasan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Dusun Pagerjurang, Desa Melikan, Kecamatan Wedi, Selasa (30/1/2024).

Saat kunjungan kerja di Klaten, Jawa Tengah, Ketua DPR RI Puan Maharani 'dicegat' sejumlah kepala desa (Kades) yang menanyakan kelanjutan pembahasan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Puan pun menerima aspirasi mereka.

Kepada Puan, para kades tersebut meminta agar revisi UU Desa segera disahkan. Mereka juga mengaku tidak ikut datang ke Jakarta beberapa waktu lalu saat para Kades berdemo di DPR. "Alhamdulillah kita bisa urun rembuk dan saya bisa mendengarkan aspirasi dari kepala desa," kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/1).

Puan dan para kades itu duduk dalam satu meja dan saling

berhadapan. Ia kemudian menjelaskan bahwa DPR tetap berkomitmen menyelesaikan pembahasan revisi UU Desa, meski tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Mengingat saat ini situasi politik jelang Pemilu 2024 sedang menghangat.

Puan lalu menjelaskan, DPR telah sepakat akan melanjutkan pembahasan revisi UU Desa usai pelaksanaan Pemilu 2024 yang akan digelar pada 14 Februari mendatang. Hal ini juga dibahas dalam rapat paripurna DPR terakhir. "Saat Rapat Paripurna, kita sudah sepakat, kan ini situasinya sedang Pemilu, jadi kita akan lanjutkan sampai selesai Pemilu nanti yang ini tinggal dua minggu lagi," tandas Puan.

tn/aha



PENGAWAS UMUM Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL PENGARAH

Suprihartini S.I.P., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

M. Ibnurkhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

WAKIL PIMPINAN REDAKSI

Rizka Arinindy, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Agus Budi Leksono, S.A.P (Kasubag Analisis Media)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR

Agung Hidayat, S.I.P, Ridwan Budiman, S.I.P, Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Fadlun Bariyah, Prima Danutirto, A.Md,

Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Savogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Iwan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firsta Dysie, Balggys Maesynthia, Anju Alfonce Stimpul, Zulfikar Mubien

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD, Moempoeni, Azka Restu Afidhillah, Geraldi Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen

ANALIS MEDIA

Supian, S.E. Larissa Amanda Indianti Sjahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhani, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah,

Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Ihsan Syahrezi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E.

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

M. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Zulfikar, S.A.B.

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK
PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

Scan QR
untuk berita
selengkapny



Netralitas Pimpinan Tertinggi ASN Jadi Teladan Jajaran di Bawahnya

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menekankan netralitas

Aparatur Sipil Negara (ASN) jadi teladan bagi jajaran di bawahnya. Karena itu, soal netralitas ini harus terus diawasi selama Pemilu berlangsung saat ini. Hal itu disampaikan Saan usai memimpin Tim Komisi II melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa (30/1).

"Netralitas ASN ini penting dan juga harus diteladani oleh pimpinan yang tertinggi di Kabupaten Cianjur ini. Jari supaya jajaran ke bawahnya juga bisa menerapkan prinsip-prinsip *Clear and Clean*. Karena memang pemilu kali ini yang menjadi sorotan itu terkait dengan netralitas dari ASN," jelas Saan kepada Parlementaria.

Saan juga meminta agar pengamanan logistik pada Pemilu 2024, khususnya berkaitan secara teknis distribusi. Oleh karena dari sisi geografis, Kabupaten Cianjur merupakan daerah yang rawan terjadinya bencana alam.

"Dari sisi teknis (distribusi) logistik, Cianjur ini kan daerah-daerah yang cukup rawan terjadi bencana dari sisi geografis dan daerah ini jaraknya jauh-jauh. Maka pengamanan logistik itu menjadi sangat penting," tutur Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Dirinya juga mengingatkan jangan sampai ada masyarakat yang pada tanggal 14 Februari yang sudah berusia 17 tahun serta sudah memenuhi syarat hak pilih,

”

KITA BERHARAP PEMILU DI CIANJUR INI BERLANGSUNG DENGAN LANCAR, TIDAK ADA PERSOALAN APAPUN. YANG PALING PENTING PEMILU INI BISA BERJALAN DENGAN KREDIBEL BERINTEGRITAS, TRANSPARAN, AKUNTABEL. SEHINGGA, KUALITAS PEMILUNYA BISA BERJALAN DENGAN BAIK

akan tetapi belum terdata oleh KPU setempat. "Kita meminta kepada KPU (dan) Pemerintah Daerah untuk terus menerus mendata terutama yang terkait soal Pemilih Pemula yang sampai tanggal 14 Februari dia genap berusia 17 Tahun dan itu harus segera diberikan hak pilihnya dengan cara pencetakan KTP Elektronik harus menjadi Prioritas," ungkapnya.

Di akhir penyampaiannya, ia pun berharap agar Pemilu 2024 di Kabupaten Cianjur bisa berjalan sesuai dengan apa yang masyarakat harapkan. "Kita berharap Pemilu

di Cianjur ini berlangsung dengan lancar, tidak ada persoalan apapun. Yang paling penting pemilu ini bisa berjalan dengan kredibel berintegritas, transparan, akuntabel. Sehingga, kualitas pemilunya bisa berjalan dengan baik," tutup Legislator Dapil Jawa Barat VII itu.

— aar/rdn



FOTO: ARN/PDT

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa saat memimpin Tim Komisi II melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa (30/1/2024).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Legislator Minta Penyelenggara Pemilu Segera Selesaikan Potensi Data Pemilih Ganda

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI Guspard Gaus menekankan agar KPU, Bawaslu, dan seluruh pemangku kebijakan terkait segera mengambil langkah antisipasi potensi masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda untuk Pemilu 2024 mendatang. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor, utamanya pemilih memiliki nama yang mirip.

"Saya berharap kepada KPU dan seluruh pemangku kebijakan untuk segera melakukan pembenahan terhadap potensi pemilih ganda yang diekspos oleh berbagai media masa. Ini bisa dilakukan secara tuntas sebelum pelaksanaan 14 Februari mendatang, dan tidak lagi terjadi di berbagai Kabupaten Kota dan Provinsi di Indonesia," ungkap Legislator Fraksi PAN ini usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik di Sumatera Barat, pada Selasa (31/1).

Selain itu, Guspard Gaus juga menegaskan pentingnya peran pengawasan secara keseluruhan dalam mewujudkan pemilu yang adil dan demokratis. Beliau menyampaikan komitmen Komisi II untuk terus bekerja sama dengan pihak terkait guna menjaga integritas dan kredibilitas pemilu di Sumatera Barat, terlebih di seluruh Indonesia.

"Kami melakukan kunjungan ini tentu dalam rangka memastikan bagaimana kesiapan serta persiapan yang dilakukan oleh KPU

dan jajaran lainnya untuk pelaksanaan pemilu. Kami berkomitmen untuk menjalankan fungsi pengawasan apalagi menjelang kontestasi besar pemilu 2024 ini," ungkapnya kepada Parlementaria.

Dalam acara tersebut, juga dilakukan evaluasi yang membahas temuan dan rekomendasi yang dihasilkan selama kunjungan. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi langkah-langkah perbaikan atau peningkatan kualitas

penyelenggaraan pemilu di Sumatera Barat.

Kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Sumatera Barat merupakan bagian dari upaya nyata untuk menjaga integritas dan kredibilitas pemilu sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia. Melalui dialog dan evaluasi, diharapkan langkah-langkah perbaikan dapat segera diimplementasikan demi terwujudnya pemilu yang bersih, adil, dan demokratis. — blf/aha



FOTO: BLF/PDT

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI Guspard Gaus saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik di Sumatera Barat, pada Selasa (31/1/2024).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Potensi Impor 5 Juta Ton Beras, Komisi IV Soroti Tajam Keberpihakan Terhadap Nasib Petani

Komisi IV DPR RI menyoroti tajam soal kebijakan potensi impor beras sebesar 5 juta ton pada tahun 2024. Alasan impor beras akibat El Nino juga dinilai tidak memiliki argumentasi kuat. Pasalnya, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia kerap mengimpor beras sepanjang tahun 2014-2023. Terbesar, Pemerintah Indonesia memutuskan impor beras sebesar 3,06 juta ton pada tahun 2023.

Anggota Komisi IV DPR Slamet menegaskan rencana impor beras bukan langkah antisipatif. Dibandingkan mengusahakan kesejahteraan, Pemerintah Indonesia malah menjerumuskan para petani dalam jurang kemiskinan.

Sebab itu, dirinya mendorong Pemerintah Indonesia berupaya berbenah diri. Satu di antaranya adalah mengevaluasi dan memperbaiki sistem logistik nasional. "Ini memprihatinkan. Ini bukan semata-mata karena El Nino. Pemerintah di sini harus transparan dan sepatutnya mengevaluasi," ungkap Slamet saat ditemui oleh Parlementaria, Senin (29/1/2024).

Turut menegaskan, Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia berulang kali juga mengingatkan Kementerian Pertanian untuk memperbaiki data beras stok nasional. Baginya, data ini vital guna mengukur kebutuhan dan kekuatan pasokan beras yang diperoleh.

”

PEMERINTAH INDONESIA BERUPAYA BERBENAH DIRI. SATU DI ANTARANYA ADALAH MENGEVALUASI DAN MEMPERBAIKI SISTEM LOGISTIK NASIONAL. INI MEMPRIHATINKAN. INI BUKAN SEMATA-MATA KARENA EL NINO. PEMERINTAH DI SINI HARUS TRANSPARAN DAN SEPATUTNYA MENGEVALUASI.

Anggota Komisi IV DPR Slamet.

Tanpa usaha perbaikan ini, baginya, Pemerintah Indonesia dinilai abai soal kedaulatan pangan negara. Sebab itu, ia konsisten mendorong upaya perbaikan data stok beras nasional. "Basis datanya dari mana? Perlu kita pertanyakan mengapa harus impor (beras)? Memang impor (beras) ini sebenarnya untuk siapa? Kalau bisa stabilisasi, masa serap gabah petani rendah ketika panen. Mengapa harus impor sebanyak itu?" pungkas politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu. **ts/aha**



FOTO: TS/PDT



Jalan Parung Panjang Rusak, Legislator Ingatkan Pemprov Realisasikan Jalan Khusus Tambang

Wilayah Parung Panjang kini mengalami perkembangan yang sangat pesat sebagai daerah penunjang Ibu Kota. Akan tetapi, kemajuan tersebut tidak dibarengi oleh perbaikan infrastruktur jalan sehingga warga dan kendaraan umum sudah tidak bisa berbagi jalan dengan kendaraan tambang.

Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi berpandangan bahwa wacana jalan

khusus tambang dinilai bisa menjadi opsi sebagaimana usulan yang sudah digulirkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov), namun hingga hari ini belum terealisasi. Ia berharap negara dapat hadir dengan maksimal.

"Maka saya akan meminta audiensi segera dengan Pak Gubernur supaya Beliau bisa mengusulkan supaya Pusat bisa segera mengintervensi. Keberadaan jalan tambang kalau itu memang betul solusi, kita ingin menanyakan

payung hukumnya seperti apa, komitmennya seperti apa dan terpenting kapan direalisasikannya sampai bisa difungsikan," ujar Mulyadi usai menerima audiensi dengan Gerakan Masyarakat Arus Bawah dan Gerakan Masyarakat Parung Panjang Untuk Perubahan, di Ruang Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/1)

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini mengingatkan Pemerintah Pusat untuk mengintervensi perbaikan jalan daerah melalui Inpres yang terkorelasi dengan revisi UU Jalan yang sudah disahkan. Dalam aturan tersebut disampaikan APBN bisa mengintervensi jalan jalan yang berstatus jalan kabupaten maupun provinsi.

"Ini adalah *warning* kepada Pemda bahwa harapan-harapan masyarakat yang belum juga diselesaikan ini seolah-olah *mem-bypass* langsung ke Pusat, supaya negara hadir dalam konteks kebijakan maupun anggaran dari Pusat," tegas Legislator Dapil Jawa Barat V ini.

Sementara itu, salah satu perwakilan warga Parungpanjang saat diwawancarai Parlemenaria menyampaikan harapannya bahwa opsi jalur khusus tambang di Parung Panjang mutlak menjadi solusi permanen. "Jadi agar tidak ada konflik horizontal lagi antar masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pengusaha. Tapi mereka semua kita bisa berdampingan hidup dengan baik," harapnya.

pun/aha



Scan QR untuk berita selengkapnya



Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi foto bersama usai menerima audiensi dengan Gerakan Masyarakat Arus Bawah dan Gerakan Masyarakat Parung Panjang Untuk Perubahan, di Ruang Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/1/2024).

FOTO: MUN/PDT

Pemerintah Harus Bersiap Hadapi Mudik Lebaran 2024

Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi segenap *stakeholder* dari jajaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian PUPR, BMKG, Basarnas, Korlantas Polri serta Operator Nasional dan Jalan Tol atas penyelenggaraan angkutan libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) yang berjalan lancar.

Hal itu disampaikan Novita dalam rilis media kepada **Parlementaria** sebagaimana disampaikan saat Rapat Kerja dengan Menhub, Menteri PUPR, Kepala BMKG, Kepala Basarnas, Kakorlantas Polri serta Operator Nasional

dan Jalan Tol dalam rangka evaluasi pelaksanaan angkutan libur Nataru di Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (18/1).

”

APALAGI, DALAM WAKTU DEKAT KITA MASYARAKAT AKAN BERSIAP UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN MUDIK LEBARAN. KARENYA PENINGKATAN INI HARUS SEGERA DILAKUKAN, TERMASUK SOAL KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR- INFRASTRUKTUR JALAN YANG MEMADAI.

Anggota Komisi V DPR RI
Novita Wijayanti.

“Apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan angkutan libur Natal dan Tahun Baru yang telah bekerja semaksimal mungkin agar pelaksanaan liburan kemarin berjalan dengan baik,” ujar Wakil Ketua BURT DPR RI tersebut.

Kendati demikian, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini juga mengingatkan agar para pihak berwenang untuk terus melakukan evaluasi dan peningkatan yang preventif dalam mengantisipasi dan meminimalisasi terjadinya kecelakaan. “Karenanya peningkatan ini harus segera dilakukan, termasuk soal kebutuhan infrastruktur- infrastruktur jalan yang memadai” tutur Novita.

Karenanya, peningkatan kualitas pelayanan hingga pengawasan berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) harus maksimal. “Apalagi, dalam waktu dekat kita masyarakat akan bersiap untuk melakukan kegiatan mudik Lebaran. Karenanya peningkatan ini harus segera dilakukan, termasuk soal kebutuhan infrastruktur- infrastruktur jalan yang memadai,” tandasnya.

Dengan melakukan peningkatan fasilitas umum ini, Novita berharap Pemerintah akan semakin memastikan bahwa kegiatan mudik lebaran mendatang dapat berjalan lancar, efisien, dan nyaman bagi semua pemudik.

“Langkah ini tidak hanya memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, tetapi juga menciptakan pondasi yang kokoh untuk pengelolaan transportasi yang berkelanjutan di masa mendatang,” pungkas Legislator Dapil Banyumas-Cilacap, Jawa Tengah ini. **pun/rdn**



FOTO: RSB/PDT

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Masyarakat Apresiasi DPR Terima Keluhan terkait Persoalan di Kawasan Puncak

Semakin masifnya pembangunan di kawasan Puncak, Bogor, yang tidak memperhatikan kearifan lokal, menjadi permasalahan serius yang dialami masyarakat Bogor Selatan. Salah satu akibatnya adalah kemacetan yang terus terjadi di kawasan Puncak yang semakin mengganggu aktivitas masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS) atau Kerukunan Warga Puncak (KWP) dalam audiensi dengan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal dan Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi, di Gedung

Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (1/2).

Anggota Komisi V DPR Mulyadi mengatakan pihaknya telah memberikan berbagai usulan untuk mengatasi kemacetan di kawasan Puncak. Paling tidak, ada lima opsi yang telah disampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Mulai dari pelebaran jalan, memecah titik kemacetan, usulan adanya jalan layang, hingga pemaksimalan fungsi Tol Bogor Ciawi Sukabumi.

"Kemarin sudah bisa mengurangi beban Puncak melalui revitalisasi jalur yang berbatasan antara Kecamatan Cipanas di Hanjawar ke Kecamatan Sukamakmur di Bogor

Timur. Itu sudah berhasil dilakukan pembangunan dan alhamdulillah itu sangat signifikan mengurangi beban macet Puncak walaupun itu saya kira hanya bagian dari cara bagaimana beban jalur puncak *eksisting* itu berkurang," ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Ke depan, ia berharap pemerintah dapat benar-benar hadir secara maksimal untuk mengatasi kemacetan yang terjadi di kawasan Puncak, akibat dari pembangunan wisata yang semakin masif di kawasan tersebut. Termasuk dengan senantiasa mempertimbangkan dampak lingkungan dan masyarakat sekitar.

— **bia/rdn**



FOTO: GÉR/PDI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal dan Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi, saat menerima audiensi masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS) atau Kerukunan Warga Puncak (KWP) di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Paramitha Minta Proses Audit Smelter Nikel yang Meledak di Morowali Terus Dilakukan

Seminggu usai terjadinya ledakan smelter nikel PT. Sulawesi Mining Investment (SMI) di Morowali, Sulawesi Tengah, pada Jumat 19 Januari 2024 lalu, Anggota Komisi VII DPR RI, Paramitha Widya Kusuma meminta agar terus dilakukan audit pada smelter tersebut dan *smelter* lainnya.

"Ini sudah seminggu sejak terjadinya peristiwa ledakan *smelter* nikel PT. Sulawesi Mining Investment (SMI) di Morowali, Sulawesi Tengah. Dan karena peristiwa ini bukan yang pertama kali, maka kami minta proses audit terhadap *smelter* tersebut tetap harus dilakukan," ujar Mitha, begitu Paramitha biasa disapa, saat ditemui Parlementaria di Demak, Jawa Tengah, Selasa (23/1).

Hal tersebut, menurut Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini, semata agar tidak terulang kembali

peristiwa serupa, yang tidak hanya menimbulkan korban materi, namun juga banyak korban meninggal

”

INI SUDAH SEMINGGU SEJAK TERJADINYA PERISTIWA LEDAKAN SMELTER NIKEL PT. SULAWESI MINING INVESTMENT (SMI) DI MOROWALI, SULAWESI TENGAH. DAN KARENA PERISTIWA INI BUKAN YANG PERTAMA KALI, MAKA KAMI MINTA PROSES AUDIT TERHADAP SMELTER TERSEBUT TETAP HARUS DILAKUKAN.

dunia. Sebut saja akhir tahun 2023 lalu peristiwa ledakan tungku pengolahan hasil tambang atau smelter ini juga terjadi di Morowali yakni smelter Nikel milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) yang menewaskan puluhan korban jiwa.

Oleh karena itu, tak berlebihan jika kemudian DPR RI, khususnya Komisi VII DPR mendesak pemerintah untuk terus mengaudit *smelter* yang ada. Baik dari sisi kualitas alat atau mesin yang ada, serta pelaksanaan prosedur K3 atau Keselamatan, Kesehatan Kerja di masing-masing perusahaan tambang yang ada.

Bahkan pihaknya meminta pemerintah tidak ragu untuk menindak atau memberi hukuman kepada pemerintah yang tidak menerapkan K3, atau yang tidak melakukan perawatan yang selayaknya kepada alat dan fasilitas yang ada. [ayu/rdn](https://www.ayu.rdn)



FOTO: AYU/PDI

Anggota Komisi VII DPR RI, Paramitha Widya Kusuma saat mengikuti acara BKSAP Days, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Esti Wijayati Salurkan Bantuan dan Peralatan Siaga Bencana Hidrometeorologi di Sleman

Anggota Komisi VIII DPR RI My Esti Wijayati memberikan bantuan logistik dan peralatan untuk siaga darurat bencana hidrometeorologi kepada Pemerintah Kabupaten Sleman. Esti menyampaikan penanggulangan bencana tak hanya menjadi perhatian pemerintah, namun juga bagi seluruh masyarakat.

Adapun bantuan yang diserahkan berupa 200 paket sembako, 200 buah selimut, dan 200 buah terpal. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh, Esti Wijayanti kepada Wakil

Bupati Sleman, Danang Maharsa seperti keterangan yang diterima Parlemenaria. Senin (29/1).

Maka dari itu, pemahaman terhadap tindakan antisipasi bencana ini perlu dilakukan secara serius. Pada momen ini, Esti mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan Pemkab Sleman dan BNPB dalam menyalurkan bantuan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi ini.

"Kita harus serius dalam aksi kemanusiaan ini. Maka dari itu mari kita hadapi bersama dan tidak perlu ragu untuk mendiskusikan berbagai kendala yang kita hadapi," jelas Esti. Ia juga mendorong sinergi dari seluruh pihak untuk memperkuat komitmen dalam

mengantisipasi timbulnya korban bencana dengan berbagai aksi nyata.

Sementara itu, Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa menyampaikan kondisi Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Sleman menjadi perhatian Pemkab Sleman. Untuk itu, status ini kemudian ditindaklanjuti melalui SK Bupati Sleman Nomor 675 Tahun 2023, tentang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Sleman.

"Penetapan SK ini dilakukan untuk mengantisipasi ancaman bencana seperti kekeringan, banjir, angin kencang, tanah longsor, cuaca ekstrem dan kebakaran hutan mulai 1 Desember 2023 hingga 29 Februari 2024 mendatang," jelas Danang.

— **tn/aha**

”

KITA HARUS SERIUS DALAM AKSI KEMANUSIAAN INI. MAKA DARI ITU MARI KITA HADAPI BERSAMA DAN TIDAK PERLU RAGU UNTUK MENDISKUSIKAN BERBAGAI KENDALA YANG KITA HADAPI.

Anggota Komisi VIII DPR RI My Esti Wijayati.



Scan QR untuk berita selengkapnya



Maman Imanulhaq Usulkan Kenaikan Gaji Rp5 Juta untuk Pendamping PKH

Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq mengusulkan kenaikan gaji sebesar Rp 5 juta per bulan kepada para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Maman mengatakan hal ini sebagai bentuk penghargaan kepada para SDM Program Keluarga Harapan (PKH) yang terbukti berhasil memberikan pelayanan kepada para penerima manfaat di desa.

"Kami di Komisi VIII DPR RI selalu mengusulkan peningkatan gaji kepada para pendamping PKH. Kerja mereka tidak mudah di lapangan untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat miskin agar memperoleh akses terhadap perlindungan sosial maupun kesehatan," kata pria yang kerap disapa Kiai Maman di Hotel Horison Majalengka, Kamis (25/1).

Selain itu, dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria, Politisi Fraksi PKB itu juga berharap para SDM PKH ini diberikan asuransi kesehatan serta bonus lainnya agar semakin giat dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia menegaskan, keberhasilan Program Keluarga Harapan tidak akan lepas dari peran para penyelenggaranya, yaitu para SDM PKH yang profesional.

Sebagai mitra kerja Kementerian Sosial, lanjutnya, Komisi VIII DPR RI akan terus mendorong para SDM PKH untuk diberikan pembekalan agar semakin profesional dan terampil dalam melayani masyarakat. "Dengan SDM PKH yang profesional,

masalah-masalah yang selama ini ada di lapangan seperti validasi data akan terminimalisir," ujarnya.

”

HENTIKAN EKSPLOITASI KEMISKINAN MASYARAKAT. JANGAN JADIKAN ORANG MISKIN DAN KEMISKINAN SEBAGAI KOMODITAS YANG DIEKSPLOITASI DAN DIPOLITISASI.

Anggota Komisi VIII DPR RI,
Maman Imanulhaq.

Meski begitu, ia mencatat bahwa upaya serius dalam menurunkan jumlah kemiskinan, masih ada saja oknum politik yang mengeksploitasi kemiskinan dan menjadikannya sebagai komoditas politik.

Lebih lanjut, ia secara tegas meminta segala bentuk eksploitasi terhadap masyarakat miskin untuk dihentikan. "Hentikan eksploitasi kemiskinan masyarakat. Jangan jadikan orang miskin dan kemiskinan sebagai komoditas yang dieksploitasi dan dipolitisasi," ucap Kiai Maman.

tn/rdn



FOTO: RSB/PDT

Scan QR untuk berita selengkapnya



Usut Tuntas Kasus 40 Anggota KPPS yang Keracunan di Cilacap

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani Aher meminta pihak berwajib untuk mengusut tuntas kasus keracunan pada 40 Anggota KPPS di Cilacap, Jawa Tengah, saat mengikuti bimtek KPPS.

"Kejadian keracunan ini sangat memprihatinkan mengingat penyelenggaraan pemilu 2024 tinggal menghitung hari saja. Seharusnya hal-hal yang berpotensi mengganggu

”
KEJADIAN KERACUNAN INI SANGAT MEMPRIHATIKAN MENINGGAT PENYELENGGARAAN PEMILU 2024 TINGGAL MENGHITUNG HARI SAJA. SEHARUSNYA HAL-HAL YANG BERPOTENSI MENGGANGGU STABILITAS DAN KONSENTRASI PEMILU 2024 DAPAT DIHINDARI,

Anggota Komisi IX DPR RI
Netty Prasetyani Aher.

stabilitas dan konsentrasi pemilu 2024 dapat dihindari," kata Netty dalam keterangan tertulisnya yang diterima **Parlementaria**, di Jakarta, Rabu (31/1).

"Kepolisian harus mengusut tuntas kasus keracunan massal anggota KPPS di Cilacap, Jawa Tengah. Kita tahu, peran KPPS sangat penting dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu. Jika ada hal buruk menimpa KPPS tentu dapat menimbulkan persoalan," tambahnya.

Menurut Netty, pengusutan kasus harus dilakukan secara tuntas dan transparan agar tidak menimbulkan kabar hoax. "Jangan ada *hoax* beredar seperti soal kecurigaan adanya unsur kesengajaan meracuni. Ini akan membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada penyelenggaraan pemilu," jelasnya.

Selain itu, Netty juga meminta agar Kementerian Kesehatan dan KPU menata pengawasan kesehatan untuk para KPPS. "Selain faktor kelelahan, faktor makanan yang bersih, higienis dan sehat juga harus diperhatikan. Anggota KPPS rentan keracunan makanan karena dalam setiap *event* tersedia makanan ringan ataupun berat. Nah ini kontrolnya bagaimana?," ungkap Netty.

Sebagai informasi, sebanyak 40 Anggota KPPS di Cilacap, Jawa Tengah mengalami keracunan. Diduga, penyebab keracunan tersebut dari makanan yang disediakan oleh catering saat bimbingan teknis KPPS.

FOTO: MUN/PDT
rmn/aha

Scan QR untuk berita selengkapnya



Tolak Hentikan Dana LPDP, Komisi X Usulkan Tambah Kuota Beasiswa

Alih-alih menggulirkan wacana untuk menghentikan sementara alokasi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), lebih baik pemerintah membuat kebijakan untuk menambah kuota penerimaan beasiswa. Usulan ini perlu dipertimbangkan agar generasi muda bangsa semakin mudah memperoleh akses pendidikan hingga ke perguruan tinggi.

Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda melalui rilis yang dikutip oleh *Parlementaria*, di Jakarta, Sabtu (27/1). Ia secara tegas menolak rencana Pemerintah Indonesia yang akan mengalihkan alokasi anggaran LPDP untuk kebutuhan pengembangan riset negara.

"Kami menolak penghentian kucuran dana APBN untuk LPDP. Dalam pandangan kami justru kucuran dana untuk LPDP ditambah agar kuota mahasiswa penerima beasiswa dari program ini makin banyak," tutur Huda.

Berdasarkan laporan yang dirinya terima, kuota penerima beasiswa LPDP di kisaran 9.000-10.000 mahasiswa dalam satu tahun. Setiap tahun, APBN dikucurkan sebesar Rp20 triliun untuk Dana Abadi Pendidikan. Di mana, dana tersebut digunakan untuk membiayai Program LPDP.

Diketahui, kini Dana Abadi Pendidikan (DAP) telah terkumpul sebanyak Rp140 triliun dengan nilai manfaat per tahun digunakan untuk membiayai keperluan beasiswa

pada kisaran Rp5 triliun. Mengetahui informasi tersebut, Huda lebih mendukung untuk menambah kuota penerima beasiswa LPDP.

Penambahan kuota ini, menurutnya, perlu diupayakan lantaran angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi di Indonesia hingga saat ini masih dinilai rendah

jika dibandingkan dengan beberapa negara di ASEAN, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Badan Pusat Statistik melaporkan hanya ada 10,15 persen penduduk Indonesia yang mampu menamatkan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi.

Ia menyebutkan, faktor tingginya biaya pendidikan perguruan tinggi adalah penyebab utama APK pendidikan tinggi di Indonesia rendah. "Kami menilai pemerintah harus mulai memikirkan langkah terobosan untuk meningkatkan peluang bagi peserta didik Indonesia agar bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Bisa jadi dengan

menggunakan manfaat dana abadi pendidikan," tutup Politisi Fraksi PKB itu. — ts/rdn

”
KAMI MENOLAK PENGHENTIAN KUCURAN DANA APBN UNTUK LPDP. DALAM PANDANGAN KAMI JUSTRU KUCURAN DANA UNTUK LPDP DITAMBAH AGAR KUOTA MAHASISWA PENERIMA BEASISWA DARI PROGRAM INI MAKIN BANYAK.

Ketua Komisi X DPR
Syaiful Huda.



FOTO: DEP/PTD

Scan QR untuk berita selengkapnya



Komisi X Tekankan Pemerintah Serius Cegah Kekerasan di Lingkungan Pendidikan

Berdasarkan laporan yang dihimpun oleh Yayasan Cahaya Guru melalui pantauan pemberitaan media massa sepanjang 1 Januari-10 Desember 2023, ada 136 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan. Memakan korban sebanyak 339 orang, Komisi X DPR menegaskan kekerasan di dunia pendidikan tidak boleh dibiarkan tanpa penanganan tegas.

Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudien menekankan pemerintah pusat melalui Kementerian

”

**PERAN GURU BK
ATAU KONSELOR DI
LINGKUNGAN SEKOLAH
SANGAT PENTING
DALAM MEMBANTU
SISWA MENGATASI
TANTANGAN AGAR
MUDAH MERAHAI
POTENSI PENUH
MEREKA.**

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan mendukung terbentuknya Tim Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan (TPPK) di sekolah.

Tim ini, nilainya, bisa menjadi solusi untuk membantu akselerasi terbentuknya suasana inklusif, aman, dan nyaman di lingkungan pendidikan.

la menyebutkan TPPK dapat membuat tata tertib pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah, mendorong pelaksanaan kegiatan sekolah yang berkebhinekaan dengan melibatkan kepek, orang tua atau wali sekolah.

Tidak hanya itu saja, TPPK melakukan sejumlah kegiatan. Mulai dari, edukasi, sosialisasi dan kampanye daring (online) di satuan pendidikan, mengajarkan pendidikan penguatan karakter dan memberikan fasilitas guru untuk mendapatkan pelatihan sekaligus peningkatan kapasitas diri dalam mencegah atau menangani kasus kekerasan di sekolah.

”Menyediakan bangunan, gedung dan fasilitas pembelajaran yang ramah bagi peserta didik penyandang disabilitas serta menyediakan kanal aduan. Lalu, memberikan saksi dan konsekuensi yang tidak melibatkan

kekerasan atau memberikan nasihat pada anak tidak berupa makian, cacian, kata-kata kasar tetapi dengan ucapan yang lemah lembut,” papar Hetifah dalam rilis yang dikutip oleh Parlemen, Minggu (28/1).

Di sisi lain, Politisi Fraksi Partai Golkar itu berharap Guru Bimbingan dan Konseling bisa lebih aktif di sekolah. Peran Guru BK bisa dimaksimalkan dengan memberikan pelayanan berupa membimbing para pelajar untuk memiliki keterampilan sosial, memahami dan memecahkan masalah yang terjadi, serta membantu pelajar agar mengambil keputusan yang bertanggung jawab supaya menjadi manusia yang mandiri.

”Peran guru BK atau konselor di lingkungan sekolah sangat penting dalam membantu siswa mengatasi tantangan agar mudah meraih potensi penuh mereka,” tandas Legislator Dapil Kalimantan Timur itu.

ts/aha

**Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Hetifah Sjaifudien.**



Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Komisi X Serap Aspirasi UMKM Batik di Pekalongan

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih bersama tim melakukan kunjungan kerja spesifik ke Pemerintah Kabupaten Pekalongan di Jawa Tengah yang dihadiri oleh pelaku UMKM batik. Dalam kunjungan itu, ia menyerap aspirasi tentang bisnis dan tantangan industri kain khas Indonesia tersebut.

Salah satu tantangan yang ia dengar adalah banyaknya duplikasi terhadap batik oleh negara besar seperti China. "Iya memang produk kita banyak sudah di duplikasi oleh negara-negara besar seperti China, dan ini tantangan buat kita tadi di forum ini muncul bahwa ada order sesungguhnya ketika ibadah haji itu kan ada seragam batik," ujarnya saat kunjungan ke Pekalongan, Jawa Tengah, Senin (29/1).

Lebih lanjut, ia menyebutkan jika ada permintaan besar seperti batik untuk jemaah haji, Fikri menerima usulan dari warga yang dikunjungi agar permintaan pasar itu dapat diserahkan kepada UMKM ketimbang perusahaan besar. "Ternyata ujungnya adalah kembali lagi ke pabrikan perusahaan besar yang mungkin ini tantangan buat pemerintah daerah. Pemerintah pusat juga advokasi atau afirmasi kepada mereka," ungkapnya.

Legislator Fraksi PKS ini juga menjabarkan terdapat berbagai macam batik mulai dari batik tulis, batik cap dan batik tulis *custom*. Ketiganya memiliki ciri khas tersendiri yang berasal dari pengrajin Pekalongan yang berbeda dengan proses pembuatan pabrikan besar.

"Kalau kita mau menumbuhkan

”

JIKA ADA PERMINTAAN BESAR SEPERTI BATIK UNTUK JEMAAH HAJI, FIKRI MENERIMA USULAN DARI WARGA YANG DIKUNJUNGI AGAR PERMINTAAN PASAR ITU DAPAT DISERAHKAN KEPADA UMKM KETIMBANG PERUSAHAAN BESAR.

mereka (SDM pembatik tulis), tentu bagaimana supaya tidak memilih hanya karena harganya murah. Kita tidak tahu kan? Misalnya tentu kualitas batik tulis yang *custom* yang cap misalnya, tetapi asli Pekalongan itu tentu lebih bagus *loh* daripada pabrikan yang jumlahnya besar. Mungkin ada biaya produksi yang lebih murah, tetapi kekhasan, keunikan dan mungkin dari segi estetika dan seterusnya kreativitas berbeda," urainya.

"Oleh karenanya, tantangan buat kita semuanya terutama pemerintah dan sudah disampaikan oleh pengrajin disini untuk membela untuk berpihak kepada UMKM kita," jelasnya. — **mri/aha**



FOTO: MRI/PDT

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih saat kunjungan ke Pekalongan, Jawa Tengah, Senin (29/1/2024).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Kaji Ulang Pendanaan PTNBH Kerja Sama dengan Pinjol untuk Bayar Kuliah

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Pemerintah mengkaji ulang konsep pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), yang melakukan kerja sama dengan pinjaman *online* (pinjol) untuk pembayaran kuliah. Konsep tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2013 tentang bentuk dan mekanisme pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), utamanya terkait otonomi pengelolaan pendanaan.

Ia meminta Kemendikbud Ristek merekomendasikan PTNBH untuk menghentikan kebijakan tersebut jika terbukti memberatkan mahasiswa. Desakan itu disampaikan merespons kasus pembayaran biaya kuliah dengan menggunakan pinjaman *online* (Pinjol) yang terjadi di Institut Teknologi Bandung.

"Kami tentu tidak ingin otoritas pengelolaan sumber pendanaan ini justru memicu komersialisasi pendidikan entah itu melalui UKT atau seleksi masuk mahasiswa baru melalui jalur mandiri," kata Huda dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (30/1).

Tak hanya itu, Huda juga mendorong penyediaan skema baru dalam pembayaran kuliah bagi mahasiswa yang keberatan membayar selain menggunakan Pinjol. "Kami mendorong juga ada kajian untuk skema baru untuk meringankan beban mahasiswa yang kesulitan membayar UKT," ujar Politisi Fraksi PKB ini.

Di sisi lain, Huda membenarkan bahwa PTNBH memiliki kewenangan dalam menentukan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi para mahasiswa mandiri. Kendati demikian, merujuk Pasal 65 ayat 4 UU No. 12 /2012 tentang Pendidikan Tinggi, PTNBH harus menentukan UKT yang terjangkau masyarakat.

Huda juga menegaskan PTNBH tak boleh hanya terpaku kepada mahasiswa dalam mendapatkan

”

PENGUNAAN PINJOL DALAM SKEMA PEMBAYARAN UKT HANYA MENJADI JALAN PINTAS YANG MERUGIKAN MAHASISWA. IA JUGA MENILAI SKEMA TERSEBUT DAPAT DISALAHGUNAKAN OLEH PARA MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN LAIN.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda.

FOTO: DEP/PDT

sumber pendanaan. "Saat ini sebagian PTNBH masih mengandalkan biaya pendidikan dari mahasiswa sebagai sumber utama pendanaan. Padahal mereka telah diberikan otoritas yang relatif luas menggali sumber pendanaan di luar APBN," jelas dia.

Lebih lanjut, Huda menilai penggunaan pinjol dalam skema pembayaran UKT hanya menjadi jalan pintas yang merugikan mahasiswa. Ia juga menilai skema tersebut dapat disalahgunakan oleh para mahasiswa untuk kepentingan lain.

Kami menilai skema cicilan UKT dengan pinjol ini merupakan short cut yang merugikan mahasiswa. Bagi mahasiswa yang benar tidak mampu mereka terpaksa mengambil opsi ini, bagi mahasiswa nakal opsi ini bisa disalahgunakan untuk kepentingan lain.

Ujungnya mahasiswa dan wali mahasiswa yang dirugikan," pungkas dia. [@bia/rdn](#)



Scan QR untuk berita selengkapnya



Marwan Cik Asan Apresiasi Keberpihakan Himbara terhadap UMKM Nasional

Tim Komisi XI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) ke Kota Tangerang, Banten, dalam rangka mengetahui fungsi pengawasan terkait akses kredit atau pembiayaan dari Himpunan Perbankan Negara (Himbara) kepada UMKM binaan. Dalam Kunsfik ini, Komisi XI juga ingin mengetahui strategi dan upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Himbara (Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN) dalam mempercepat akses kredit.

"Saya apresiasi keberpihakan Himbara terhadap perkembangan UMKM nasional. Di mana kita tahu bahwa UMKM menjadi salah satu pilar utama dalam menopang perekonomian nasional dan berkali-kali adanya krisis UMKM tetap eksis

menjaga perekonomian kita," jelas Anggota Komisi XI Marwan Cik Asan kepada Parlementaria di sela-sela

”

SEJAUH INI, HIMBARA SUDAH CUKUP OPTIMAL DALAM MEMBINA UMKM NASIONAL. HAL ITU TERCERMIN DARI ADANYA BERBAGAI UPAYA DILAKUKAN UNTUK UMKM, MULAI DARI PERSOALAN BUNGA PINJAMAN LEBIH MURAH, PEMBINAAN, AKSES OPERASIONAL.

peninjauan UMKM binaan Himbara di Kota Tangerang, Banten, Rabu (31/1).

Diketahui, beberapa stan binaan Himbara turut diperkenalkan di dalam agenda ini. Di antaranya, Hot Sambal Bumbu, Dapoer Djeng Ani, dan DNS Artwork binaan Bank Mandiri melalui Program KUR, serta Neng Kriwil Cemilan Kriuk Enak binaan Bank BRI. "Sehingga sebagai anggota parlemen, kegiatan pembinaan terhadap UMKM mendorong untuk bisa membuka pasar ekspor, memperluas pasar dalam negeri, dan sebagainya, tentu selalu kita dukung," jelas Politisi Fraksi Partai Demokrat itu.

Menurutnya, sejauh ini, Himbara sudah cukup optimal dalam membina UMKM nasional. Hal itu tercermin dari adanya berbagai upaya dilakukan untuk UMKM, mulai dari persoalan bunga pinjaman lebih murah, pembinaan, akses operasional. "Tapi itu tidak cukup karena UMKM kita banyak. Ini yang harus kita evaluasi agar bisa terus berkembang," tegasnya.

Ke depan, ia berharap peran Himbara dapat lebih ditingkatkan kembali, khususnya dalam mencari dan memperluas pasar (*market*), baik luar maupun dalam negeri. Sebab, mencari *market* ini dinilai lebih sulit dibandingkan dengan mencari bahan baku untuk produksi UMKM.

"Jadi menurut saya penekanannya ke depan kepada siapapun pihak-pihak yang bisa membina mereka untuk dapatkan akses yang lebih luas, baik pasar dalam maupun luar negeri," tutupnya. **rdn**



FOTO: RDN/PDT

Anggota Komisi XI Marwan Cik Asan saat mengunjungi beberapa UMKM binaan Himbara di Kota Tangerang, Banten, Rabu (31/1/2024).



Pinjol di Kalangan Remaja, Indah Kurniawati: Perlu Literasi Digital dan Keuangan

Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurniawati menilai perlu dilakukannya peningkatan literasi digital dan keuangan secara masif dan terstruktur dikalangan anak muda. Pasalnya pola hidup perilaku anak muda saat ini menurutnya cenderung memiliki keinginan yang besar untuk memiliki sesuatu secara instan melihat mudahnya akses tanpa batas yang ditawarkan dan dimiliki dalam sebuah genggam gawai.

"Terhusus kaum pelajar dan remaja yang sangat akrab dengan digital, *gadget* itu mereka pintar menggunakannya tapi juga harus disertai dengan peningkatan literasi keuangannya

agar mereka tidak mudah untuk menerima tawaran yang *to good to be true*. Literasi keuangan yang bukan hanya paham menggunakan, tapi bagaimana memanfaatkan seluruh tawaran itu untuk hal yang perlu saja dan tetap dalam prinsip utamakan kebutuhan bukan keinginan," jelas Indah usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Kota Tangerang Selatan, provinsi Banten, Rabu (31/1).

Terhadap fenomena pinjol di kalangan pelajar itu pun Politisi fraksi PDI-Perjuangan tersebut mengimbau, penting juga peran orangtua dalam hal ini untuk mengingatkan dan menjaga anak-anaknya agar tidak mudah terpengaruh dengan tawaran yang seolah-olah cepat dan

gampang namun pada akhirnya dapat membuat penderitaan.

"Disamping peran pemerintah juga tentu perlu membuat regulator yang lebih ketat lagi, agar data itu tidak mudah diakses, diterima, bahkan disebar sehingga akses penawaran terhadap pinjol ilegal lebih sulit. Pastikan pinjol itu pasti legal dan kemudian logis. Legal artinya apabila ada tawaran yang pertama bisa dikonfirmasi ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kemudian logis itu adalah sesuatu yang memang tidak wajar, jangan diikuti sebaiknya diabaikan," tandas Indah.

Oleh karenanya Indah pun senantiasa mendorong Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sebagai Bank Peserta Penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat lebih berinovasi dan maju dalam merekrut lembaga donor (pendanaan). Serta adanya pengawasan yang diberikan oleh OJK, LPS maupun BI secara khusus serta kesempatan kepada BPR untuk berkembang dalam menyalurkan kredit kepada mereka para debitur yang tepat.

"BPR karena bank umum itu memiliki tahapan atau khususnya birokrasi yang cukup rumit apabila seseorang itu ingin membutuhkan pembiayaan. Maka diperlukannya inovasi dalam hal transformasi digital yang tetap memperhatikan prinsip *governancy* dan *prudent* itu yang saya harapkan sebagai salah satu cara BPR untuk bisa bertahan dan mendapatkan *funding* sekaligus memberikan pembiayaan secara sehat," imbuhnya. **tra/aha**



Indah Kurniawati
Komisi XI DPR RI

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurniawati saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Kota Tangerang Selatan, provinsi Banten, Rabu (31/1/2024).

FOTO: TRA/PDT

Kilas Balik 2023, DPR Berhasil Transformasi Strategis Kesehatan Melalui UU Omnibus Law

Sepanjang tahun 2023, DPR RI sebagai lembaga wakil rakyat telah berhasil menorehkan prestasi dengan mengesahkan 18 Undang-Undang (UU). Dari sekian UU tersebut, terdapat beberapa milestone penting dalam kehidupan bernegara yakni disahkannya UU Omnibus Law ketiga, yaitu UU Omnibus Law di sektor kesehatan, setelah Omnibus Law sektor ketenagakerjaan (UU Cipta Kerja) dan Omnibus Law Sektor Keuangan (UU HKPD).

Demikian dikemukakan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya saat hadir sebagai salah satu narasumber secara virtual dalam Forum Group Discussion (FGD) 'DPR REWIND 2023', dengan tema 'Menilik Belakng Panggung Perwakilan Rakyat, Membedah Kinerja DPR 2023' yang digelar di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/1).

"Dalam UU Sektor Kesehatan tersebut, 9 (sembilan) UU telah berhasil dirangkum untuk melahirkan sebuah UU Kesehatan yang memiliki sebuah lompatan-lompatan yang sangat strategis dalam sektor kesehatan Indonesia," ujar Willy.

Politisi Fraksi Partai NasDem ini menekankan, catatan pertama yang paling penting dalam disahkannya UU Kesehatan tersebut adalah penerapan *hospital based* bagi pendidikan kedokteran nasional terkhusus spesialis. Mengingat, ungkap Willy, pendidikan kedokteran haruslah belajar dari *best practices* sebagaimana selama ini telah



Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya saat hadir sebagai salah satu narasumber secara virtual dalam Forum Group Discussion (FGD) 'DPR REWIND 2023', dengan tema 'Menilik Belakng Panggung Perwakilan Rakyat, Membedah Kinerja DPR 2023' yang digelar di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/1/2024)

diterapkan di banyak negara.

"Pendidikan kedokteran itu harus *based on hospital*, harus berbasis kepada rumah sakit, dimana rumah sakit lah yang menjadi kawah 'candra dimukanya, di sana penyakit hadir dan itulah kemudian kampus tidak menjadi menara gading. Kampus bukan satu-satunya unit untuk menyelenggarakan pendidikan. Tapi bagaimana antara teori dan praktek itu terkoneksi, link and match secara langsung. Dan kita bisa mematahkan adagium-adagium pendidikan yang menara gading," tandas Willy.

Poin UU Kesehatan lainnya yang juga sangat progresif adalah peningkatan pemerataan

tenaga kesehatan di daerah 3T (Tertinggal Terdepan dan Terluar). "Anak-anak didik kita, mahasiswa-mahasiswa yang dari daerah mendapatkan beasiswa dan kemudian dikembalikan ke daerah yang mengirim mereka. Ini ada obligasi yang selama ini kita tuntut, di mana distribusi tenaga kesehatan kita khususnya dokter itu sangat tersentral di Pulau Jawa atau di beberapa lokal saja. Kadang-kadang di Puskesmas kita lihat dokter nggak ada, apalagi dokter spesialis. Nah di dalam UU Kesehatan yang kita sahkan di 2023 ini kita meletakkan bagaimana mereka-mereka yang dari daerah 3T/Tertinggal Terdepan dan Terluar itu dikembalikan lagi," tukasnya. **pun/rdn**



M. Farhan: DPR Perlu Rumuskan Mekanisme Pengawasan yang Lebih Efektif terhadap Pemerintah

Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan menilai selama ini sinergitas antara DPR dan pemerintah belum optimal. Hal tersebut merespon data DPR yang diolah dari lembaga Indonesian Parliamentary Center (IPC) yang menunjukkan setidaknya 527 instruksi DPR atau sejumlah 80 persen rekomendasi sepanjang 2023, tidak dilaksanakan oleh pemerintah.

Sementara itu, hanya sekitar 128 instruksi atau sekitar 20 persen dari total 627 instruksi DPR yang dilaksanakan

oleh pemerintah. "Saya kira ini menunjukkan bahwa memang sinergitas antara DPR RI dengan pemerintah belum optimal. Artinya masih ada masalah dalam hal

mengkomunikasikan dan mengawasi pelaksanaan rekomendasi tersebut," kata Farhan kepada **Parlementaria** usai Focus Group Discussion (FGD) "DPR REWIND 2023", dengan

”

KARENA BAGAIMANAPUN JUGA PENGAWASAN INI TUJUANNYA JUSTRU UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS JALANNYA PEMERINTAHAN BUKAN SEBAGAI KENDALA PELAKSANAAN ATAU PENYELENGGARAAN NEGARA.



tema "Menilik Belakng Panggung Perwakilan Rakyat, Membedah Kinerja DPR 2023", di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Untuk itu, Politisi Fraksi Partai NasDem ini berharap DPR dan pemerintah dapat bersama-sama introspeksi diri. Sebab, fungsi pengawasan yang dilakukan DPR adalah bertujuan untuk meningkatkan efektivitas jalannya pemerintahan.

"Kita harus sama-sama melakukan introspeksi diri sebagai DPR RI untuk melihat dan membuat lagi mekanisme pengawasan yang lebih efektif gitu. Karena bagaimanapun juga pengawasan ini tujuannya justru untuk meningkatkan efektivitas jalannya pemerintahan bukan sebagai kendala pelaksanaan atau penyelenggaraan negara," harapnya. [gal, bia/rdn](#)

Scan QR untuk berita selengkapnya



Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan saat Focus Group Discussion (FGD) "DPR REWIND 2023", dengan tema "Menilik Belakng Panggung Perwakilan Rakyat, Membedah Kinerja DPR 2023", di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Indra Iskandar Tegaskan Setjen Terus Reformasi Diri, Berikan Dukungan Terbaik untuk DPR

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar, menegaskan bahwa Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI akan terus mereformasi diri untuk lebih tanggap dan cepat dalam memberikan dukungan kepada DPR RI. Dukungan itu mulai dari sisi persidangan, administrasi hingga keahlian.

"Sekretariat Jenderal ini tetap harus terus mereformasi dirinya untuk lebih tanggap dan cepat. Sehingga, kerja dewan pun lebih terakselerasi dari sisi administrasi, dari sisi persidangan, bahkan keahliannya," tegas Indra usai pembukaan Forum Group Discussion (FGD) yang bertajuk "DPR REWIND 2023" di ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Jakarta, Kamis (25/1).

Indra menjelaskan, sejatinya komunikasi DPR RI dengan masyarakat luas, saat ini semakin terbuka. Dengan Kilas Balik atau rewind pihaknya berharap pandangan dari masyarakat yang diwakili oleh akademisi oleh media, oleh praktisi untuk melihat bagaimana cara masyarakat, cara media atau publik melihat DPR saat ini.

Adapun anggota-anggota DPR RI dari beberapa fraksi juga sengaja dihadirkan dalam acara FGD tersebut untuk menyampaikan pandangan-pandangannya, bagaimana DPR selama ini juga dilihat oleh publik melalui media massa. Namun memang tidak dipungkirinya, ada kegiatan di DPR

yang tidak terinformasikan ke publik, belum terekspos ke publik, dan terdiseminasi ke publik. Hal itulah yang menurutnya menjadi sebuah *gap* selama ini.

"Kita akan perbaiki terus, ke depan memang cita-cita parlemen modern ini semua keputusan dewan yang sifatnya terbuka di komisi, di paripurna *real time* bisa dilihat oleh publik, diakses oleh publik. Bahkan putusan rapat apapun hasilnya bisa diakses publik, pelan-pelan kita akan kesana," ungkapnya.

Pada FGD kali ini, lanjut Pria Kelahiran Jakarta 14 November 1966 tersebut, merupakan bagian dari komunikasi yang kita jalin

antara DPR RI. Sekretariat Jenderal DPR RI memfasilitasi dan menjembatani komunikasi anggota DPR RI dengan pengamat media, akademisi yang selama ini memang masih ada *gap*.

"Saya juga optimis, saya yakin karena berbagai penghargaan telah kita terima dari banyak lembaga di luar Setjen DPR dalam kurun waktu dua tahun ini. Itu semua merupakan kerja keras teman-teman, dan kita semua sudah punya alat ukur untuk melihat setiap lini yang ada di Setjen DPR, dalam fungsi dukungan kepada dewan itu dievaluasi. Kita akan terus mengevaluasi, kalau tidak mencapai kinerja ya tentu kita akan merotasi dan kita carikan yang *perform*. Ini akan terus begitu sehingga semua, setiap saat juga harus sigap ya," pungkasnya.

— ayu/aha



FOTO: HAN/PDT

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar pembukaan Forum Group Discussion (FGD) yang bertajuk "DPR REWIND 2023" yang digelar oleh Biro Pemberitaan Parlemen dengan tema "Menilik Belakang Panggung Perwakilan Rakyat, Membedah Kinerja DPR 2023" di ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Biro Pemberitaan Parlemen Harus Jadi Wajah Kehumasan DPR



FOTO: HAN/PDI

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar foto bersama usai membuka pelatihan penulisan berita yang diselenggarakan Bagian Media Cetak & Media Sosial, Biro Pemberitaan Parlemen di Ruang Pansus B, Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (31/1/2024)

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mendorong Biro Pemberitaan Parlemen, unit kerja di bawah Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, untuk dapat menjadi wajah kehumasan bagi DPR RI. Biro yang berfungsi memproduksi berita seputar lembaga parlemen ini harus mampu menjadi sumber informasi kedewanan ke tengah masyarakat.

"Jadi kedepan diharapkan biro pemberitaan mampu menjadi wajah kehumasan DPR, bagian humas diharapkan bisa berpartisipasi di dalamnya," sebut Indra saat membuka pelatihan penulisan berita yang diselenggarakan Bagian Media Cetak & Media Sosial, di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (31/1).

la menghimbau kepada seluruh peserta pelatihan, yang merupakan

staf di biro pemberitaan, untuk turut serta dalam mewujudkan harapan itu. "Saya ingin semua yang ada di sini serius dalam pekerjaannya, jadikan ini *passion*, bukan hanya rutinitas biasa saja," terang Indra.

Mengingat, ia bilang, pekerjaan memproduksi berita dituntut harus kreatif dan ulet dalam menggali isu-isu terkini. Menurutnya, biro pemberitaan memiliki keunggulan tidak akan kehabisan isu berita, sebab fokusnya menaungi berita seputar DPR RI yang merupakan episentrum bahan berita nasional.

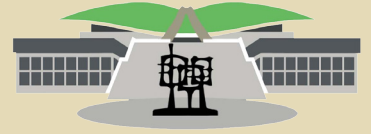
Untuk itu, Indra mengapresiasi pelatihan yang diinisiasi Biro Pemberitaan Parlemen kali ini. Pelatihan ini sangat penting dalam meningkatkan kompetensi dan kapabilitas staf di biro ini, supaya mampu menghasilkan berita kedewanan yang informatif dan menarik.

Dalam kesempatan ini, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Indra Pahlevi juga menyampaikan urgensi pelatihan ini. "Sangat perlu bagi staf dan petugas peliputan kami dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya dalam menghasilkan produk berita yang *value* baik bagi institusi DPR RI," ungkapnya.

Adapun kegiatan pelatihan ini akan berlangsung selama dua hari. Hari pertama ini mengangkat tema seputar kepenulisan judul dan teras berita serta pengutipan narasumber yang menarik. Sementara, hari kedua berisikan seputar teknik pembuatan video di media sosial. Peserta pelatihan merupakan staf yang berada pada Biro Pemberitaan Parlemen yang meliputi tiga bagian; Bagian Media Cetak & Media Sosial, Bagian Televisi & Radio Parlemen, Bagian Penerbitan. **aha**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya





Anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR RI Santoso dan Luluk Nur Hamidah menerima perwakilan demonstran dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Ruang rapat Pansus, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (31/1/2024). FOTO: MUN/PDT



Focus Group Discussion (FGD) 'DPR REWIND 2023' di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/1/2024). FOTO: FHN/PDT



Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar foto bersama usai membuka pelatihan penulisan berita yang diselenggarakan Bagian Media Cetak & Media Sosial, Biro Pemberitaan Parlemen di Ruang Pansus B, Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (31/1/2024). FOTO: FHN/PDT

